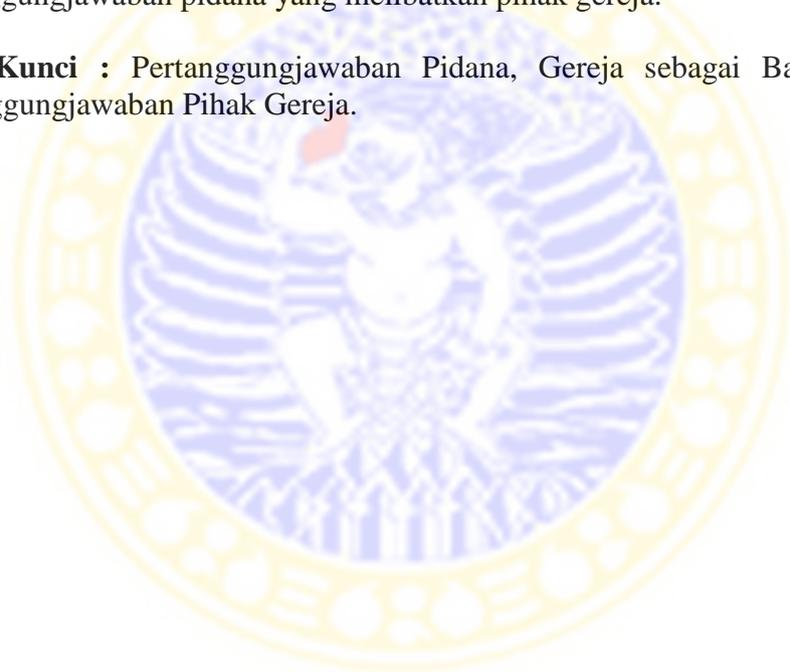


ABSTRAK

Gereja adalah badan hukum yang diakui di Indonesia. Dengan demikian gereja atau perkumpulan gereja diakui juga sebagai subjek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban, serta dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan orang (*naturlijk person*) sehingga dimungkinkan melakukan tindak pidana sama halnya dengan badan hukum pada umumnya. Dalam hukum pidana dikenal konsep Pertanggungjawaban Pidana Badan Hukum yaitu badan hukum bertanggungjawab apabila tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu perbuatan *intra vires* atau tindakan yang sesuai dengan maksud dan tujuan badan hukum tersebut dan adanya pelimpahan kewenangan dalam pelaksanaan kepada para pihak dalam suatu badan hukum. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Badan Hukum tersebut dalam perkembangannya bisa dikenakan kepada semua badan hukum, termasuk Gereja melalui pihak-pihaknya sehingga disebut sebagai pertanggungjawaban pidana yang melibatkan pihak gereja.

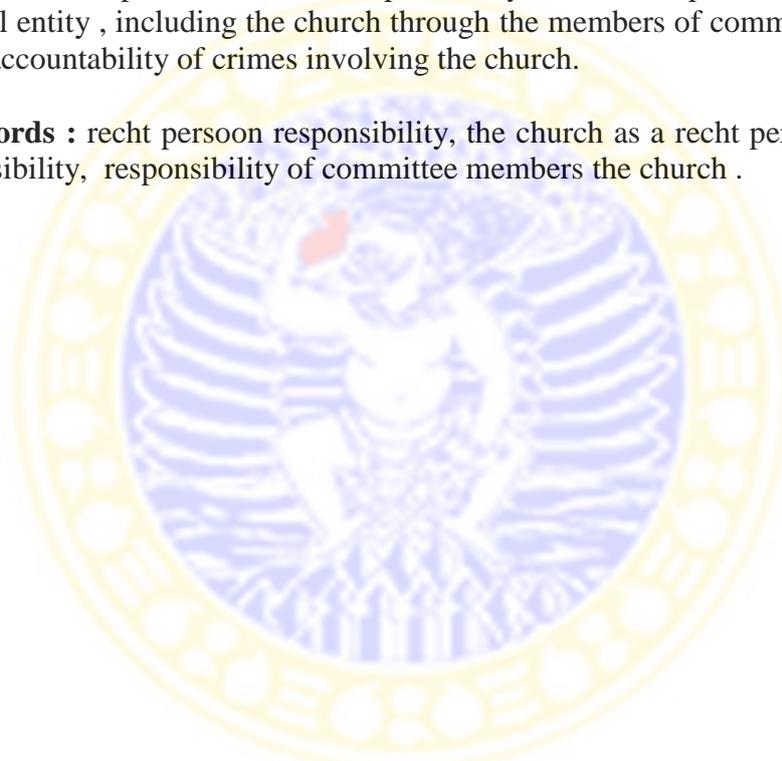
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Gereja sebagai Badan Hukum, Pertanggungjawaban Pihak Gereja.



ABSTRACT

The church is a legal entity in indonesia recognized .Thus a church or associations of the church recognized also as the subject of law , namely the holders of rights and obligations , and considered to have a notch with the same person (*naturlijk person*) possible so that crimes do the same with the law in general. In criminal law, the concept of recht persoon criminal responsibility that is a legal entity responsible, if a criminal act conducted by *inter vires* is a deed or act in accordance with the intent and purpose of the legal entity in the implementation and the delegation of authority to the parties in a legal entity. The concept of recht persoon criminal responsibility in its development can be worn to all legal entity , including the church through the members of committee so called as the accountability of crimes involving the church.

Key words : recht persoon responsibility, the church as a recht persoon criminal responsibility, responsibility of committee members the church .



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-undang nomor 8 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2000.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2001, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Staatsblad tahun 1927 Nomor 155, 156, 157, 531 tentang Regeling van de Rechtspositie der Kerk/ Kerkgenootschappen.